

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti saat ini, perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Hampir semua kegiatan sekarang berhubungan dengan bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keungan sehingga diperlukan perbankan yang sehat. Salah satu caranya dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Seluruh kalangan masyarakat baik pelaku usaha, karyawan, pensiunan, pelajar dan lain-lain tidak lepas dari kebutuhan jasa bank karena apapun yang berhubungan dengan uang tidak lepas dari kebutuhan jasa bank (Supriyono, 2011). Kebutuhan masyarakat akan kredit dan simpanan semakin menegaskan pentingnya keberadaan lembaga perbankan di kalangan masyarakat saat ini.

Berdasarkan Undang- undang No. 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyatukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Siamat, 2005). Kegiatan utama BPR Muria Harta Nusantara (MHN) adalah menerima simpanan Tabungan dan Deposito. Kemudian BPR juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian dapat dijelaskan secara luas bahwa BPR merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Pengendalian internal perlu sekali, karena mengingat sering terjadi penyelewengan, penggelapan dan berbagai tindakan yang merugikan. Hendaknya segala aktivitas yang terjadi dalam perusahaan tersebut harus dilakukan dengan baik, karena akuntansi memberikan informasi mengenai data yang dapat dinyatakan dalam satuan uang.

Semakin efektif pengendalian internal pada suatu perusahaan, maka sedikit kemungkinan penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya menunjukan bahwa banyak sekali perusahaan yang gagal melaksanakan dan meneruskan operasinya dengan baik, disebabkan hal-hal dari dalam perusahaan itu sendiri. Salah satu penyebab utama masalah tersebut karena pengendalian internal perusahaan yang lemah. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengendalian internal kas pada suatu lembaga keuangan.

Salah satu penerimaan kas BPR MHN adalah pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan dimana pendapatan tersebut merupakan hal utama dalam memberikan keuntungan pada perusahaan, namun resiko terbesar yang dihadapi

oleh BPR MHN adalah bersumber dari pendapatan kredit tersebut dikarenakan terjadinya kegagalan pembayaran dari debitur-debitur sehingga terganggunya penerimaan kas. Untuk menanggulangnya Bank melakukan analisis resiko kredit dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan. Pengendalian internal adalah suatu rencana dan metode digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismanji:2010). Pengendalian internal merupakan fungsi penting, karena pengendalian internal mengurangi terjadinya selisih kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik hingga bisa dibuatlah perbaikan.

Sebuah konsep pengendalian internal model *Committeem of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission* (COSO) adalah sebagai dasar untuk pengendalian internal. COSO ini memperkenalkan kerangka pengendalian (*control framework*) yang terdiri dari 5 komponen yaitu: lingkungan pengendalian (*control environtment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activity*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), pengawasan dan pemantauan (*monitoring*). Kelima komponen pengendalian internal ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain. kelima komponen tersebut merupakan sebuah bangunan rumah dimana lingkungan pengendalian menjadi pondasi. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya. Sedangkan monitoring menjadi atapnya. Dengan demikian, sebuah

pengendalian internal akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing (Syarifuddin:2014).

Pengendalian internal sangat besar pengaruhnya atas laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal akan tercipta suatu sarana untuk menyusun dan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan transaksi perusahaan, yang secara tidak langsung dapat dijalankan dengan baik. Sistem pengendalian internal atas penerimaan kas ini akan memberikan informasi-informasi yang penting bagi perusahaan dalam pengelolaan keuangan perusahaannya dengan baik.

Secara umum terdapat kendala yang diterapkan oleh BPR MHN dalam Pengendalian internal atas penerimaan kas yang diterapkan oleh BPR MHN yaitu adanya keterlambatan dalam pembayaran perkreditan yang dilakukan oleh debitur atau pun oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan oleh Bank tersebut kepada masyarakat tidak dibayar sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati maka akan menurunkan pendapatan sehingga mempengaruhi penerimaan kas yang mengakibatkan kenaikan *Non Performing Loan (NPL)*. NPL adalah tingkat keseluruhan pengembalian pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur non-bank, yang digunakan untuk mengukur kredit bermasalah terhadap total kredit. Apabila nilai NPL meningkat maka akan mengakibatkan terganggunya kesehatan Bank yang menyalurkan kredit, karena Bank yang dinyatakan sehat yang memiliki $NPL \geq 5\%$ sebagaimana telah ditetapkan dalam PBI No.17/11/PBI/2015. Setelah menjalankan prosedur kehati-

hatian dalam pemberian kredit yang dilakukan BPR MHN namun masih timbul masalah yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan bunga yang dijalankan oleh BPR MHN yang dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 total NPL BPR MHN ini seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

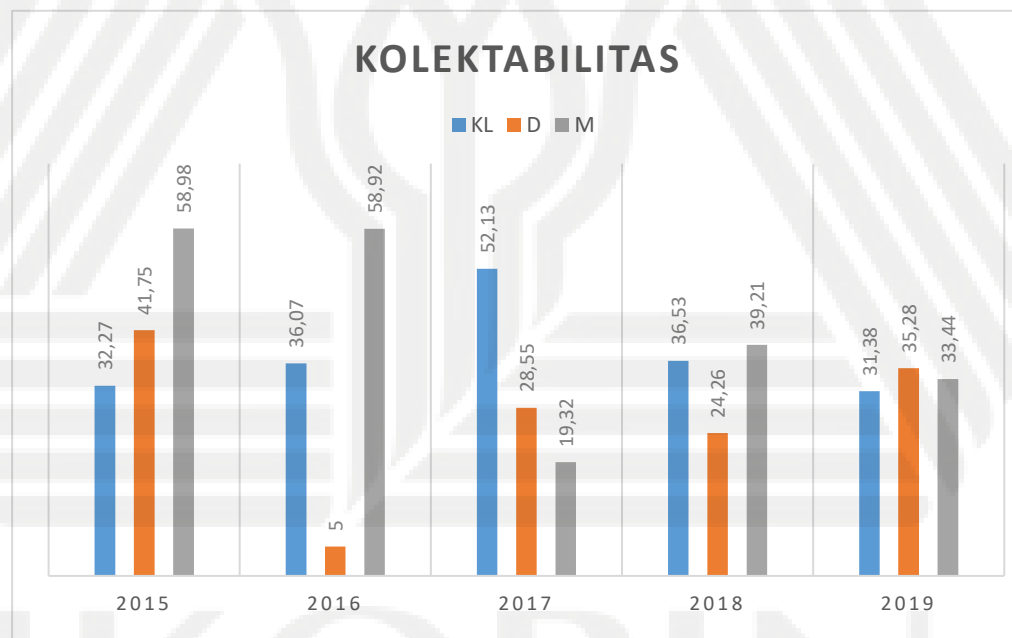
Tabel 1.1 Tabel 1 Kolektabilitas Kredit

Tahun	Jumlah Rekening				Jumlah Persentase (%)				NPL
	KL	D	M	Jumlah	KL	D	M	Jumlah	
2015	8	18	40	66	32,27	41,75	25,98	100	20,45
2016	4	9	38	51	36,07	5,00	58,92	100	11,53
2017	18	19	19	56	52,13	28,55	19,32	100	18,04
2018	31	21	56	108	36,53	24,26	39,21	100	25,56
2019	13	21	43	77	31,38	35,28	33,44	100	19,00

Sumber : BPR MHN

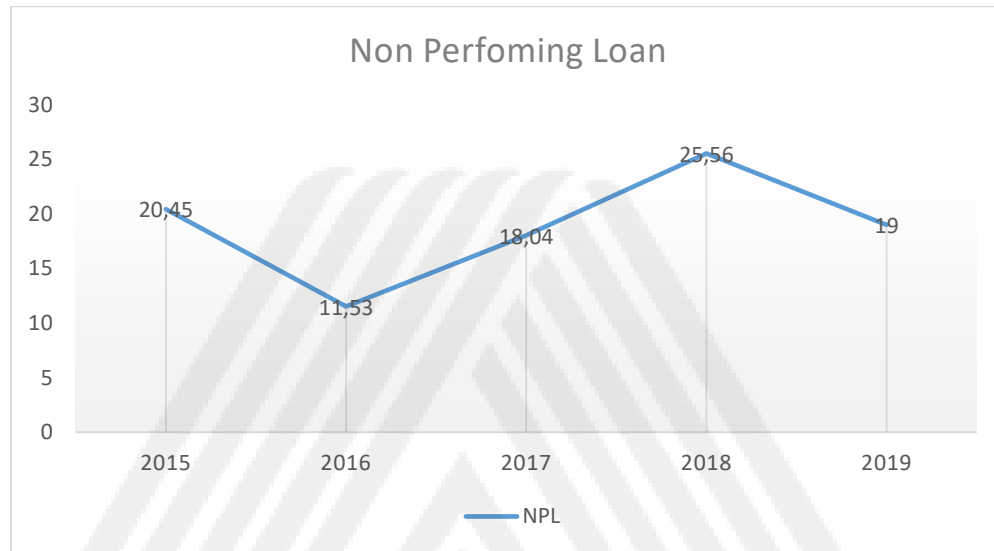
Dilihat dari data kolektabilitas diatas kredit yang disalurkan oleh PT BPR MHN dari tahun 2015 hingga tahun 2019, pembayaran kredit mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 jumlah kredit kurang lancar dan kredit macet mengalami kenaikan sebesar 3,8% dan 32,94% sedangkan kredit diragukan mengalami penurunan sebesar 36,75%, tetapi secara NPL tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,92%. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah kredit kurang lancar dan kredit diragukan mengalami kenaikan sebesar

16,06% dan 23,555 sedangkan kredit macet mengalami penurunan sebesar 39,6%, tetapi secara NPL tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,51%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah kredit macet mengalami kenaikan sebesar 19,89% sedangkan kredit kurang lancar dan kredit diragukan mengalami penurunan sebesar 15,6% dan 4,29%, tetapi secara NPL tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,52%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah kredit diragukan mengalami kenaikan sebesar 11,02% sedangkan kredit kurang lancar dan kredit macet mengalami penurunan sebesar 5,15% dan 5,77%, tetapi secara NPL tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,56%.



Gambar 1.1 Kolektabilitas Kredit

Sumber : BPR MHN



Gambar 1.2 Non Performing Loan

Sumber : BPR MHN

Keterangan :

KL: Kurang Lancar

D: Diragukan

M: Macet

Jumlah rekenig yang mengalami kurang lancar, diragukan hingga macet mengalami *fluktuasi* dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang berarti bahwa resiko ditanggung BPR MHN meningkat dan berpotensi menyebabkan permasalahan bagi perusahaan karena pada umumnya total NPL pada Bank sehat ialah $\geq 5\%$ sebagaimana telah ditetapkan dalam PBI No.17/11/PBI/2015 untuk menutupi cadangan piutang yang tak tertagih itu sendiri. Permasalahan yang ada pada BPR MHN salah satunya pada sistem pengendalian internal karena dalam pengendalian

internal yang baik dan sehat sangat berpengaruh terhadap penerimaan kas pada Bank tersebut. Terjadinya kredit macet atau bermasalah mengidentifikasi kemungkinan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan BPR MHN hal itu menjadi perhatian khusus. Salah satu faktor yang menyebabkan NPL meningkat karena kurangnya penangihan atau penanganan kredit bermasalah dari bucket kurang lancar, diragukan dan macet sehingga kurangnya penanganan kredit bermasalah akan mempengaruhi pengembalian PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sehingga berpengaruh terhadap pendapatan bunga di BPR MHN itu sendiri.

Dilihat pada fenomena diatas risiko-risiko yang melekat pada pemberian kredit sangat penting dicegah dan diminimalkan dengan menganalisis pengendalian internal atas penerimaan kas itu sendiri. Berdasarkan analisis diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas pada PT Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara’

1.2 Identifikasi Masalah

Pemberian kredit merupakan aktivitas BPR yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan tetapi resiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Bank harus melakukan analisis risiko kredit dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik. Maka dari itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara Telah Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku?
2. Bagaimana Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara sudah efektif?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara (BPR MHN) adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan dianalisa sehingga dipergunakan sebagai bahan penulisan skripsi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada PT Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara
2. Bagaimana sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada PT Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara sudah efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengendalian internal atas penerimaan kas

2. Bagi PT BPR Muria Harta Nusantara

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung pengembangan usaha perusahaan dan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pihak yang BPR MHN mengenai sistem pengendalian intern atas penerimaan kas

3. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Institut Manajemen Koperasi Indonesia dan referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara yang beralamat Jl Raya Cirebon – Bandung No. 404B, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40622.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020 – 28 Februari 2020.